

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene)



OLEH:

AULIA INDAH SARI T. TJOTENG

B111 13 068

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh :

AULIA INDAH SARI T. TJOTENG
B111 13 068

kepada

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene)

disusun dan diajukan oleh

AULIA INDAH SARI T.TJOTENG
B111 13 068

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 09 Agustus 2017
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Sekretaris


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.

NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.

NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **AULIA INDAH SARI T.TJOTENG**

Nomor Induk : B 111 13 068

Departemen : Hukum Pidana

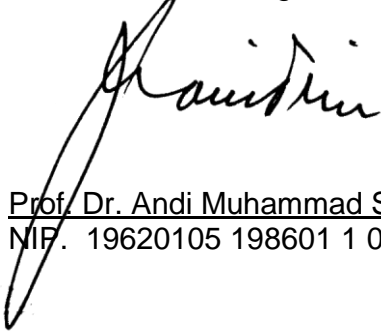
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/
PN.Pangkajene)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

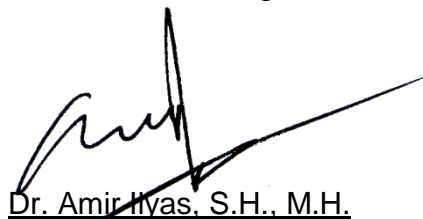
Makassar, Maret 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **AULIA INDAH SARI T.TJOTENG**
Nomor Induk : **B 111 13 068**
Departemen : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERJUDIAN**
(Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene)

Makassar, Juli 2017

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,

Prof. Dr. Ahmadi Miru,SH.,MH
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Aulia Indah Sari (B111 13 068) “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Perjudian” (Studi Kasus Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN.Pangkajene). Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing I dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penimbunan minyak dan gas bumi bersubsidi dalam Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN. Pangkajene dan yang kedua untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana dalam Putusan Nomor 90/ Pid.B/ 2014/ PN. Pangkajene.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkajene dengan metode penelitian yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) dan penelitian lapangan (*field research*). Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara hakim sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung. (2) pertimbangan oleh mejelis hakim di hadapan pengadilan dalam mengambil keputusan mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi' juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta mejiciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendampingi Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda dan Ibunda kedua orang tua Penulis yang telah membesarkan penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga penulis, menasehati, dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah kehidupan, kerja keras dan selalu bertawakkal serta menjaga penulis dengan do'a yang tak pernah putus. Beliau adalah sosok orang tua yang terbaik di dunia dan di akhirat.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi sarjana ini, dengan segala keterbatasan penulis, akhirnya selesailah skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis ingin

menghanturkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

- 1 Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan jajarannya.
- 2 Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 3 Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 4 Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 5 Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 6 Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan Jajarannya.
- 7 Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan. S.H., M.H. dan Dr. Haeranah., S.H., M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih atas bimbinganya semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
- 8 Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Perdata, Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Masyarakat dan Pembangunan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
- 9 Terima Kasih Kepada Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.

- 10 Terima Kasih Kepada Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu dan tempat selama penelitian yang berlangsung kurang lebih dua bulan lamanya dengan menjajal literatur sebagai penunjang skripsi Penulis.
- 11 Teman-teman Angkatan 2013 FH-UH, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan. Sukses selalu untuk kita semua.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Makassar, 4 Agustus 2017

Penulis,

Aulia Indah Sari T. Tjoteng

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 10
A. Pengertian Tinjauan Yuridis	10
B. Hukum Pidana.....	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Pembagian Hukum Pidana	13
C. Tindak Pidana	14
1. Istilah Tindak Pidana.....	14
2. Pegertian Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
5. Pembedaan Tindak Pidana.....	24
D. Tindak Pidana Perjudian	25
1. Pengertian Perjudian	25
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian.....	26
3. Pengertian Kupon Putih	33

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	36
1. Pertimbangan Yuridis.....	36
2. Pertimbangan Sosiologis	37
3. Pengertian Kupon Putih	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi penelitian	41
B. Jenis dan sumber data	41
C. Teknik pengumpulan data.....	42
D. Analisis data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Penerapan Hukuman Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Kabupaten Pangkajene dan Kepulaun dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene	43
1. Posisi Kasus	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	45
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	54
4. Amar Putusan	55
5. Analisis Penulis	55
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN. Pangkajene	59
1. Pertimbangan Hukum Hakim	59
2. Analisis Penulis.....	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), di jelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Artinya bahwa hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada pembukaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia dan Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan masyarakat tersebut dapat terlindungi.

Keberadaan hukum sangat dirasakan urgennya di dalam masyarakat, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum, namun kenyataannya saat ini kesadaran hukum masyarakat saat ini masih kurang oleh karena itu perlu di sadari bahwa hukum melindungi kepentingannya, tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum dan sistem pendidikan yang kurang menaruh perhatiannya dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat sekarang ini menurun, yang mau tidak mau mengakibatkan timbulnya suatu masalah berupa pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh masyarakat terhadap aturan.

Dalam dewasa ini, hakikatnya manusia saling berhubungan satu sama lain dengan cara berinteraksi, kontak atau hubungan satu sama lain yang dimaksud ialah hubungan yang menimbulkan pertentangan atau konflik, juga menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang menggerakkan peristiwa hukum. Tindak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi, kejahatan ini disebabkan karena tingkah laku manusia atau lingkungan yang mempengaruhi aktifitas masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Reaksi ini bisa berupa reaksi formal maupun nonformal di dalam reaksi formal yang akan menjadi bahan bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran atau kejahatan hukum pidana tersebut.

Dalam permasalahan sosial masyarakat hukum pidana memiliki peran penting dalam menyelesaikan kejahatan ini, khususnya dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila kejahatan ini atau pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), keistimewaan KUHP terletak pada daya pakasanya berupa ancaman pidana sehingga hukum dipatuhi dan ditaati oleh tiap individu atau subjek hukum lainnya. Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum lainnya.¹

¹ Sudarsono, 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta Hlm 211

Dalam perkembangan hukum yang ada di Indonesia saat ini masih banyak terjadi kejahatan yang menimbulkan kerugian kepada korban bahwa kurangnya pengamanan atau sanksi-sanksi yang di jatuhkan kepada pelaku kejahatan ini, terbukti banyak kasuk-kasuk tindak pidana atau tindak kejahatan yang terjadi, oleh karena itu hukum yang seharusnya melindungi masyarakat yang sampai saat ini kejahatan masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk itu ada perubahan yang mendasar pada hukum di Indonesia yang saat ini terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tanpa di sadari sehingga dapat menimbulkan dampak negatif.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat yaitu perjudian yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana biasa yang mempunyai dampak serius dalam kelompok tindak pidana kesusilaan. Saat ini perjudian telah berkembang pada semua lapisan masyarakat, dari lapisan ekonomi bawah, menengah, sampai lapisan ekonomi atas dan biasanya praktek perjudian kalangan atas dilakukan di tempat khusus serta memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dengan keuntungan yang lebih besar². Semuanya memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh hasil atau keuntungan yang berlipat ganda.

² Sadjijono .2006. *Hukum kepolisian, perspektif kedudukan dan hubungannya dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta:Laksbang PRESSIndo hlm 28

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia mengkategorikan perjudian sebagai tindak pidana meskipun cenderung bersifat kondisional. Aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat sangat jelas, tapi bisnis perjudian *illegal* di tanah air berkembang dengan sangat pesat.

Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas” , sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.³

Banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan perjudian, seperti:

1. Dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
2. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Selain itu, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah diatur dengan jelas mengenai perjudian, dimana hal tersebut di atur dalam pasal 303 menyebutkan bahwa:

³.B.Simanjuntak 1981, *pengantar kriminologi dan patologi sosial*, Bandung halm. 352

- (1) . Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barangsiapa dengan tidak berhak:
 - 1e. Menurut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun untuk memakai kesempatan itu ;
 - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian
- (2) Kalau siteralah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dapat dipecat dari jabatannya itu.
- (3) Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasar untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain(KUHP 35,37,542)

dan Pasal 303 bis KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
 1. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
 2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi oleh umum, kecuali yang berkuasa telah memberi izin mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktunya melakukan pelanggaran belum dua tahun, sejak ketetapan putusan hukum yang terdahulu bagi siteralah lantaran salah satu pelanggaran ini , maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Dalam Pasal 303 KUHP ini, mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum.

Perjudian merupakan perbuatan yang bersifat spekulasi belaka, resiko dalam perjudian yang tentunya dapat membuat orang menjadi kaya akan harta. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang di buatnya sengasara. Hal inilah yang selalu mendorong orang untuk berspekulasi dengan harapan akan menang dengan sedikit taruhan. Dorongan untuk menang ini membuat seseorang selalu bergairah, sehingga tidak terasa seluruh harta bendanya habis terkuras di meja judi. Bahkan anak dan istri pun ikut terlantar akibat perjudian.

Adapun penulis mengemukakan contoh kasus yang berhubungan dengan perjudian togel yang akan diangkat judul yang berhubungan dengan penelitian penulis :

TRIBUNSIDRAP.COM, - Satuan Intelkam Polres Sidrap, menangkap Aris (45), karena diduga seorang bandar judi togel alias kupon putih dengan omset ratusan juta rupiah, Selasa (19/1/2016) malam.

Dari tangan penjual buah-buahan di jalan poros Rappang-Enrekang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Sidrap ini, diamankan barang bukti uang Rp 12.020.000, dua buku rekening, lima ponsel, kalkulator, lima buku rekapan dan buku shio.

Penangkapan yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Sidrap, AKP Fantry Taherong, berdasarkan laporan warga yang resah dengan maraknya judi tersebut.

Aris menggeluti judi togel Singapura dan Hongkong dan beroperasi di Kecamatan Panca Rijang, Baranti, dan Kulo. Aris yang digelar 'Raja Judi Togel' Rappang ini, sudah lama menjadi target operasi.

Kapolres Sidrap, AKBP Anggi Naulifar Siregar, menjelaskan dalam dua pekan terakhir, mereka berhasil menangkap tiga bandar judi kupon putih. Penangkapan Aris paling istimewa karena dialah bandar terbesar dengan omset ratusan juta rupiah.

"Komitmen kami adalah memerangi kasus-kasus judi seperti ini. Makanya, jika ada laporan masyarakat, pasti kami tindaklanjuti," kata AKBP Anggi NS kepada tribunsidrap.com, di ruang kerjanya, Mapolres Sidrap, Rabu (20/1/16).

AKP Fantry Taherong menjelaskan, bisnis judi kupon putih dijalankan menggunakan jaringan internet melalui website Lotus 4D, Indo Togel, Vegas 4D, Totobet, Jaya 4D, King 4D, IBC 4d, dan Hoki 88.

"Tersangka mengikuti website permainan asal Hongkong, Singapura, Taipe, kemudian disebar ke akun khusus website judi togel miliknya," ungkap Fantry.

Dalam menjalankan bisnisnya, Aris merekrut kurir atau pengepul yang bertugas mengumpulkan semua pesanan nomor buntut dari pelanggannya⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat judul:
“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam usaha

⁴ <http://makassar.tribunnews.com/2016/01/20/intel-polres-sidrap-bekuk-raja-judi-togel-rappang> di akses pada 27januari 2017 pukul 13:46

perjudian studi kasus dalam putusan **Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene ?**

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam usaha perjudian studi kasus dalam putusan **Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene ?**

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana perjudian Togel di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dalam putusan Nomor 76/Pid.B/2013/PN.Pangkajene.
2. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian Togel di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam putusan Nomor: 76/Pid.B/2013PN.Pangkajene.

D. Kegunaan penelitian

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi hukum dalam tindak pidana perjudian.

2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia umumnya di Kabupaten Pangkajene khususnya, dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian kupon putih atau togel atau nomor buntut.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Sebelum menguraikan pengertian tentang tindak pidana, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian tinjauan yuridis. Menurut Kamus Besar Indonesia Tinjauan terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis”. Tinjauan berasal dari kata dasar “tinjau” yang artinya melihat atau memeriksa; menilik; mempertimbangkan kembali, mempelajari dengan cermat ; atau memeriksa untuk memahami. Sedangkan pengertian “Tinjauan” dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau; pandangan; pendapat atau sesudah menyelidiki dan mempelajari. Jadi tinjauan merupakan pemeriksaan yang teliti; penyelidikan; kegiatan pengumpulan data; pengolahan; analisa; dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.⁵

Sedangkan menurut Kamus Hukum, yuridis berasal dari kata *jurisdictie, jurisdiction* (Ing.) yang artinya kekuasaan yang mengadili. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Yuridis dapat diartikan juga sebagai *JudicatUUr, Rechtspraak*(Bid.) atau pengadilan. Semua putusan pengadilan selain memuat alasan-alasan dan

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia(1991:1198)

dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁶

Pengertian tinjauan Yuridis sama dengan hukum pidana materil yaitu yang ditinjau adalah unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, pidana dan pemidanaan , dan pertanggung jawaban pidana.

B. Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian hukum pidana sebagai berikut.

Pengertian hukum pidana menurut pendapat para ahli:⁷

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan” yaitu oleh intansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

WLG. Lemaire mengemukakan bahwa:

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-undang (selanjutnya disingkat UU)) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu system norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan

⁶Yan PramadyaPuspa, 1977, Kamus Hukum, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang. Hlm 493.

⁷ EY.Kanter dan R. Sianturi.*Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. 1986. Hlm 12-14

bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut (pengertian ini tampaknya dalam arti hukum pidana materiel).

WFC. Hattum mengemukakan bahwa:

Hukum pidana (positif) adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh Negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.

WPJ. Pompe mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah hukum dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang abstrak dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret.

Kansil mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Meskipun para ahli tersebut diatas yang menyatakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana dan ada kalanya saling bertentangan, pada pokoknya dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana itu adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang ditentukan menurut UU, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dapat dikenakan, dan mampu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.⁸

⁸ Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung. 2011. Hlm 9

2. Pembagian Hukum Pidana

Dalam perkembangannya, hukum pidana dibedakan dalam beberapa bentuk, sebagaimana didasarkan:⁹

a) Materi yang diatur:

Hukum pidana terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Jika hukum materiil terdiri dari perbuatan apa saja yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan apa hukuman yang dapat dijatuhkan, maka hukum pidana formil berbicara tentang bagaimana menegakkan hukum pidana materiil itu.

b) Sumber diaturnya:

Hukum pidana dibedakan ke dalam hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang terdapat dalam KUHPidana dengan istilah lain hukum pidana yang terkodifikasi, sedangkan hukum pidana khusus adalah semua aturan hukum pidana yang diatur di luar KUHPidana.

c) Kepada siapa berlakunya:

Hukum pidana dibedakan juga ke dalam hukum pidana umum (dalam arti berlaku untuk semua golongan) dan hukum pidana khusus (dalam arti berlaku hanya untuk golongan tertentu).

d) Wilayah berlakunya:

Hukum pidana dapat dibedakan ke dalam hukum pidana nasional dengan hukum pidana lokal. Hukum pidana nasional, berlaku sebagai hukum positif yang berlaku di seluruh wilayah Negara, sedangkan hukum pidana lokal berlaku hanya pada daerah tertentu saja.

e) Hukum pidana positif dan hukum pidana yang dicita-citakan:

Seperti pengertian hukum positif secara umum, maka hukum pidana positif yang dimaksud hukum berlaku pada waktu tertentu dan pada wilayah tertentu. Jika hukum positif yang disebut juga *ius constitutum*, maka lawannya adalah hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum*, dalam hal ini adalah Rancangan KUHPidana Nasional.

⁹ *Ibid.* Hlm 13-18

f) Hukum pidana Internasional dan hukum pidana Nasional:

Secara umum yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur tindak pidana internasional dan cara penegakan hukumnya, termasuk kerja sama internasional yang harus dilakukan dalam penegakan hukum tersebut.¹⁰ Berbeda dengan hukum pidana nasional yang berlaku untuk Negara tertentu dan bersumber dari hukum pidana nasional dalam kerangka sistem hukum suatu Negara, hukum pidana internasional berlaku secara universal dan sumber hukumnya adalah hukum internasional.

g) Berdasarkan Bentuknya:

Lazim disebut juga istilah hukum pidana tertulis dipadankan dengan hukum pidana tidak tertulis.¹¹

C. Tindak pidana (*Strafbaarfeit*)

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaarfeit*. Terjemahan atas istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit* dan sebagainya.¹²

Menurut Adami Chazawi¹³, ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* baik yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam literature

¹⁰ Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Universitas Andalas Press. Padang. 2006. Hlm 40

¹¹ Erdianto Effendi. *Op.cit.* Hlm 26

¹² Erdianto Effendi. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung. Hlm 97.

¹³ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2005. Hlm 67

hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* antara lain adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana:

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UURI) Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta dan beberapa ketentuan perundangan lainnya.

b. Peristiwa Pidana:

Beberapa ahli hukum misalnya R. Tresna, H. J van Schravendijk, A. Zainal Abidin menggunakan istilah peristiwa pidana. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 (selanjutnya disingkat UUDS 1950).

c. Delik:

Sebenarnya, delik berasal dari bahasa latin *delictum* dan digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literature yang ditulis oleh beberapa para ahli hukum seperti E. Utrecht, walaupun beliau juga menggunakan istilah lain yakni peristiwa pidana. Begitupun juga A. Zainal Abidin Farid menggunakan istilah ini, serta Moeljatno juga menggunakan istilah yang sama walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.

d. Pelanggaran Pidana dapat dijumpai dalam tulisan M. H Schravendijk.

e. Perbuatan yang boleh dihukum istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.

f. Perbuatan yang dapat dihukum istilah ini digunakan oleh pembentuk UU dalam UU Nomor 12/ Drt Tahun 1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

g. Perbuatan Pidana istilah ini digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisannya.

Strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.¹⁴

2. Pengertian Tindak Pidana

Beberapa ahli pidana yang memberikan batasan atau pengertian terhadap tindak pidana, sebagai berikut:

M. Marwan dan Jimmy P. mengemukakan bahwa:¹⁵

Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Pompe mengemukakan bahwa:¹⁶

Strafbaarfeit secara teoritis sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Simons mengemukakan bahwa:¹⁷

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh UU, bertentangan dengan

¹⁴ *Ibid.* Hlm 69

¹⁵ M. Marwan, SH & Jimmy P. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya. 2009. Hlm 608.

¹⁶ PAF.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. Hlm. 182.

¹⁷ EY.Kanter dan R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM. Jakarta. Hlm 205

hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Vos mengemukakan bahwa:¹⁸

Tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian tindak pidana yang dirumuskan oleh Vos apabila dibandingkan dengan Simons dan Van Hamel, maka rumusan Vos tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti: sifat melawan hukum, dilakukan dengan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa:

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberikan keterangan “*een vierkante tafel is vierkant*” (meja segi itu adalah segi empat), karena definisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian “orang” dan “kesalahan” juga tidak disinggung,¹⁹ karena apa yang dimaksud *strafbaarfeit*, sebagai berikut:

1. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
2. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gevearbrenge van een rechtsbelang*).²⁰

Moeljatno mengemukakan bahwa:

Istilah *strafbaarfeit* sebagai “perbuatan pidana” menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:²¹

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

¹⁸ Jur, Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta. 2004. Hlm 97

¹⁹ Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Hlm 161

²⁰ *Ibid*.

²¹ Moeljatno. *Asas- asas Hukum Pidana. Cetakan II*. Rineka Cipta. Jakarta. 2002. Hlm 56

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaarfeit*, adalah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidana seseorang atau perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta melawan unsur-unsur dalam UU.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana **Roni Wiyanto** mengemukakan sebagai berikut:²²

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk UU tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik

²² Roni Wiyanto. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju. Bandung. Hlm 169-173

pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam UU Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam UU karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- b. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam UU. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik UU, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam UU.

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)

- 1) Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal UU yang bersangkutan.
- 2) Delik materiil (*materiel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)

- 1) Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan
- 2) Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan

d. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

- 1) Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.
- 2) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

e. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

- 1) Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
- 2) Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

f. Delik *Commisionis*, *Ommisionis* dan *Commisionis Per Ommisionem Commissa*

- 1) Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh UU.

- 2) Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diharuskan oleh UU.
- 3) Delik *commisionis per ommisionem commisa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

g. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

- 1) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh UU telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.
- 2) Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus

h. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

- 1) Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik
- 2) Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.

i. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

- 1) Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya
- 2) Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki unsur yang dirumuskan atas UU sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidanya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya berbeda. Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 unsur, sebagaimana C.S.T. Kancil mengemukakan, sebagai berikut:²³

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
5. Kelakuan itu diancam pidana

Untuk mendapatkan gambaran mengenai kelima unsur tersebut di atas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumusan tindak pidana yang dijabarkan Pasal 362 KUHPidana, yang berbunyi :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.

Unsur- unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHPidana, yaitu :

²³ C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1989. Hlm 290.

1. Barangsiapa
2. Mengambil
3. Sesuatu barang
4. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
5. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Jadi menurut **Moeljatno** bahwa, dapat diketahui unsur- unsur tindak pidana, maka:²⁴

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Sedangkan menurut **EY. Kanter dan SR. Sianturi**, unsur- unsur tindak pidana adalah:²⁵

- a. Subjek
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang- undang/ perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Demikian diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana di atas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan di dalam UU.

²⁴ Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta. 1983. Hlm 22-23

²⁵ EY. Kanter dan R. Sianturi. *Op.cit.* Hlm 211

5. Perbedaan Tindak Pidana

- a. *Mala in se* dan *Mala prohibita*, pembedaan delik ke dalam *mala in se* dan *mala prohibita*. Kelsen dalam bukunya, teori hukum murni, menyatakan bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekuensinya.²⁶
- b. Delik *omisi* dan delik *comisi*, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sesungguhnya dikenal pula berbagai perbedaan delik, diantaranya delik *omisi* dan *comisi* yang berdasar cara melakukan tindak pidana. Delik *comisi* ialah delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana, delik *omisi* ialah terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan.²⁷
- c. *Delik formil* dan *delik materiel*, atas dasar cara perumusannya, delik dibedakan antara delik formal dan materiel, delik formil lebih menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan.
- d. Delik mandiri dan delik berlanjut, atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri dan delik berlanjut.²⁸
- e. Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, perbedaan dari kedua tindak pidana tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana

²⁶ Hans Kelsen. *Teori Murni Tentang Hukum, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory Of Law*. Alih bahasa Soemardi. Rimdi Press. Jakarta. 1995. Hlm 51

²⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 95.

²⁸ EY.Kanter dan R. Sianturi. *Op.cit*.

umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHPidana, sedangkan hukum pidana khusus adalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur di luar KUHPidana

- f. Kejahatan umum dan kejahatan politik, menurut **Remelink**, kejahatan politik mereka yang dengan kesadaran menentang tertib hukum yang berlaku kerana pendapat tentang Negara atau hukum yang mereka anut, sedangkan kejahatan umum dilakukan dengan motivasi kepentingan diri sendiri.²⁹

D. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian perjudian

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral pancasila serta, membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat.

Perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.

Perjudian adalah mengadakan taruhan dengan sejumlah uang dalam permainan tebakan yang didasarkan pada faktor kebetulan.

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 73.

Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.³⁰

Selanjutnya, dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP mengartikan judi sebagai:

Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umunya bergantung kepada keuntungan-keuntungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah:

- a. Permainan/ perlombaan, perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati jadi bersifat rekreatif. Namun di sini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bambang mahriyanto, Media Center, Surabaya. Hal.263

mereka adalah penonton atau atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

- b. Untung-untungan, artinya untuk menenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/ kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih
- c. Ada taruhan, dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam PP No.09 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penertiban perjudian, adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan , semisal Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB). Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur masuk kategori judi, bila dalam praktiknya memenuhi ketiga unsur tersebut.

Di dalam KUHP, perjudian pada awalnya diatur dalam Pasal 542 yang diancam pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurungan maksimum

satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas). Oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Dalam kuhp ada dua pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP, yaitu : Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu;
Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;
- 3) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam rumusan Pasal 303 KUHP di atas memuat 5 kejahatan mengenai perjudian yang terdapat dalam ayat (1) , yaitu:

- a) Dalam butir 1, memuat dua kejahatan;
- b) Butir2, memuat satu macam kejahatan;
- c) Butir 3, memuat satu macam kejahatan

Sementara dalam ayat (2) tentang dasar pemberatan pidana, dan ayat (3) memuat tentang pengertian judi yang ada dalam ayat (1).

Lima kejahatan yang disebut diatas mengandung unsur tanpa izin, dalam unsur tanpa izin inilah melekat unsur melawan hukum kelima kejahatan diatas. Dengan demikian kejahatan ini, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Kejahatan Pertama

Kejahatan yang dimuat dalam butir 1 yaitu: melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur dalam kejahatan ini sebagai berikut:

Unsur Objektif

Perbuatan : 1) menawarkan kesempatan

2) memberikan kesempatan

Objek : untuk bermain judi tanpa izin dijadikan sebagai mata pencaharian

b. Kejahatan Kedua

Dalam butir 1 : melarang orang tanpa izin dengan turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

Unsur objektif

Perbuatan: turut serta

Objek : dalam suatu kegiatan usaha permainan tanpa izin

Unsur subjektif : Dengan sengaja

Dalam kejahatan ini, perbuatannya adalah turut serta artinya dia ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi. Unsur kesengajaan dalam kejahatan ini menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keikutsertaanya itu adalah bermain judi.

c. Kejahatan Ketiga

Kejahatan bentuk ketiga ialah melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Unsur objektif :

Perbuatan: 1) menawarkan

2) memberikan kesempatan

Objek : kepada khalayak umum

Unsur subjektif: Dengan sengaja

Jadi kejahatan ini sama dengan kejahatan pertama menawarkan dan memberikan kesempatan. Dalam kejahatan ini menawarkan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum artinya kepada diberikan kepada siapapun, tidak di tujukan pada perorangan atau orang tertentu. Adanya unsur kesengajaan dimana menghendaki perbuatan

tersebut dilakukan dan sadar bahwa di depan khalayak umum adalah bermain judi .

d. Kejahatan Keempat

Kejahatan bentuk keempat adalah larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin.

Unsur Objektif :

Perbuatan : turut serta

Objek : Dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin

Unsur subjektif : Dengan sengaja

Perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian. Kegiatan usaha perjudian disini adalah kegiatan dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum. Kesengajaan dalam kegiatan ini bukan sebagai mata pencaharian.

e. Bentuk Kelima

Bentuk kejahatan ialah melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur objektif

Perbuatan : turut serta

Objek: dalam permainan judi tanpa izin sebagai mata pencaharian

Pada bentuk kelima si pembuat ikut terlibat bermain judi bersama orang yang bermain, dan bukan terlibat bersama pembuat yang melakukan kegiatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut

bermain judi . dari permainan judi inilah dia dapat penghasilan untuk keperluan hidupnya.

Kejahatan mengenai perjudian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau pinggir jalan umum atau tempat yang dikunjungi umum, kecuali jika ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak enam juta rupiah.
 - a. **Kejahatan Pertama**

Kejahatan bentuk pertama ialah melarang orang bermain judi dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303. Unsur dalam kejahatan ini ialah perbuatannya bermain judi. Dalam pasal 303 telah menjelaskan bahwa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan sebagai mata pencaharian dan menawarkan dan memberi kesempatan bermain judi kepada khalayak umum adalah

kejahatan. Oleh sebab itu barang siapa yang menggunakan kesempatan bermain judi, dia telah melakukan kejahatan Pasal 303 bis yang pertama.

b. Bentuk Kedua

Kejahatan bentuk ini adalah melarang orang ikut serta bermain judi di jalan umum, atau ditempat lainnya yang dapat dikunjungi umum; kecuali ada izin dari penguasa dalam hal untuk mengadakan perjudian itu. Unsur dalam kejahatan ini si pembuat ikut serta dalam permainan judi. Dalam perbuatan turut serta ini dilakukan oleh 2 (orang) atau lebih.

Perbuatannya : bermain judi

Dengan menggunakan kesempatan yang diadakan dengan melanggar Pasal 303.

3. Pengertian kupon putih

Kupon putih adalah salah satu jenis judi yang sangat marak di Indonesia. Kupon putih atau biasa disebut togel/nomor buntut, bukanlah hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia bahkan sampai ke seluruh dunia. Permainan kupon putih adalah permainan menebak angka yang akan dikeluarkan bandar/rumah judi pada saat tertentu dengan imbalan yang fantastis tergantung ketepatan dan jumlah angka benar yang menjadi tebakan kita.

Sekarang ini judi kupon putih tidak hanya dimainkan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan sudah dimainkan oleh para remaja bahkan

kaum wanita. Selain sebagai sampingan kupon putih juga kerap dijadikan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat. Bahkan sekarang ini bukan rahasia lagi bagi para pemain judi kupon putih ini, karena bahkan ditempat umumpun mereka terang-terangan dalam melakukan perjudian ini.

Aturan dalam bermain kupon putih ini yaitu:

- a) 1 kupon putih berharga Rp.1000,-
- b) Setiap kupon hanya bisa diisi 1 bilangan (2angka, 3 angka, atau 4 angka)

Adapun cara bermain kupon putih yaitu :

- a) Menghitung angka keluar

Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para pemain judi kupon putih ini, padahal dalam matematika berapapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi

- b) Tembak langsung

Selain dengan menghitung, kupon putih biasa ditembak langsung oleh para pemainnya. Maksudnya yaitu tidak dengan cara langsung tapi dengan cara langsung memprediksikan angkanya.

- c. Memanfaatkan mimpi

Para pemain judi kupon putih inipun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat seakan menjadi kenyataan. Terkadang kayanya para pemain judi kupon putih ini mendapat mimpi yang berhubungan dengan angka .

Dalam permainan judi kupon putih ini, jika tebakkan benar maka si pemain mendapat hadiah. Dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakkan yang dipasang. Misalnya saja apabila seseorang memasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya adalah 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhan akan dikalikan 300 (tiga ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus).

Dalam perjudian kupon putih di Indonesia dikenal dengan dua cara penjualan yaitu:

1. Kupon putih yang dijual secara langsung oleh pengecer kepada target pasarnya. Di Indonesia hampir merata di tiap Kampung, Dusun, Desa, Kabupaten, Kecamatan dan Provinsi.
2. Kupon putih yang dijual secara online. Dulu penjualan dengan cara ini hampir tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, karena keterbatasan penggunaan teknologi internet yang mendukungnya. Namun sekarang penjualan dengan cara ini sudah sangat besar pertumbuhannya dikarenakan teknologi informasi yang telah berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Jadi bisa dikatakan cara penjualan langsung maupun cara penjualan melalui internet sama besarnya.

E. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/ *dictum* putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat menjadi 2 (dua) kategori, yakni: Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non- yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan fakta- fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh UU ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan agama terdakwa.

Fakta- fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung

atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta- fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur- unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal- hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Hal- hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*).

2. Pertimbangan Sosiologis

Pasal 5 ayat (1) UURI Nomor 48 tahun 2009 yang berbunyi hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai- nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah- tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, di kalangan praktisi hukum, terdapat kecendrungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan

normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas- asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor- faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai- nilai yang meringankan maupun hal- hal yang memberatkan terdakwa
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada terdakwa, yaitu “hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu

hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan)
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang- ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi
- e. faktor penyebab terjadinya pelanggaran
- f. Sebab- sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
- g. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu :

1. Fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika

pengadilan menjadi penerjemahan yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.

3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakana Badan Legislatif sehingga fungsi Hakim menjadi relative lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.
4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum” Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan.³¹

³¹ Ahmad Ali. *Menguak Tabir Hukum*. Galia Indonesia. Jakarta. 2008. Hlm 158

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan yaitu di Pengadilan Negeri Pangkajene. Pemilihan lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa pada instansi tersebut, sesuai studi kasus yang penulis akan kaji sekaligus yang berwenang memutus perkara tersebut pada peradilan tingkat pertama.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empirik yang diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang menangani kasus tersebut.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, surat kabar, majalah, bacaan-bacaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, dan hasil kajian ataupun melalui elektronik yang ada sekarang ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

2. Wawancara

Penulis mengadakan 'penelitian secara langsung dengan wawancara dan tanya jawab dengan aparat hukum dalam hal ini adalah hakim yang memutuskan perkara tersebut.

3. Studi Dokumen

Penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, makalah serta data yang didapatkan dari penelusuran melalui media internet, atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukuman pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perjudian kupon putih di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menganalisis hukum pidana dari segi pidana materil dan pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa yang melakukan melawan hukum

1. Posisi Kasus

Dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene mengenai Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan oleh seseorang. Bahwa ia terdakwa BASRI Bin MA'RANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Sentral Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan pangkajene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi kupon putih disekitar pasar sentral

palampang maka dilakukanlah patroli oleh petugas dari Kepolisian Polres Pangkep yaitu Hendrik RB Bin Marten Luther beserta temannya, dan dari penyelidikan yang dilakukan, maka terdakwa dicurigai oleh petugas sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam Handphone terdakwa berupa pesan singkat dari Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x).

- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut ada beberapa macam shio yang dipasang yaitu shio 1 sampai dengan shio 12 dan terdakwa melakukan pemasangan / pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dan terdakwa menerima pesanan nomor setiap hari lewat via sms/pesan singkat di handphone milik terdakwa dan kemudian sms tersebut diteruskan kepada Sahar (DPO) dan setelah pengundian maka terdakwa menerima uang dari Sahar (DPO) untuk membayar orang-orang yang nomornya naik.
- Bahwa adapun permainan judi kupon putih tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan system undi atau diundi setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat, yang mana jenis pemesanannya ada yang pesan nomor dan ada yang pesan shio dan cara pemasangan untuk shio yaitu jika pasang Rp. 1.000,- untuk shio 1 maka jika shio 1 naik maka diperoleh sebesar Rp. 10.000,- sementara cara pemasangan untuk nomor yaitu ada beberapa macam nomor yang dipasang yaitu mulai dari 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, khusus yang nomor menggunakan 2 digit yang biasa dipesan yaitu mulai dari nomor 00 s/d 99, dan sebagai contoh pemesanan yaitu jika angka yang dipesan 99 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- , jika yang di pesan 3 digit yaitu 999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- sementara yang pemesanan 4 digit yaitu 9999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dari hasil penjualan ketika ada nomor yang undiannya naik, namun jika tidak ada nomor yang naik terdakwa mendapatkan uang dari Sahar (DPO) sebesar Rp. 50.000,- perhari.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

DAKWAAN:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BASRI Bin MA'RANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Sentral Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan pangkajene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi kupon putih disekitar pasar sentral palampang maka dilakukanlah patroli oleh petugas dari Kepolisian Polres Pangkep yaitu Hendrik RB Bin Marten Luther beserta temannya, dan dari penyelidikan yang dilakukan, maka terdakwa dicurigai oleh petugas sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam Handphone terdakwa berupa pesan singkat dari Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x).
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut ada beberapa macam shio yang dipasang yaitu shio 1 sampai dengan shio 12 dan terdakwa melakukan pemasangan / pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu, dan Minggu, dan terdakwa menerima pesanan nomor setiap hari lewat via sms/pesan singkat di handphone milik terdakwa dan kemudian

sms tersebut diteruskan kepada Sahar (DPO) dan setelah pengundian maka terdakwa menerima uang dari Sahar (DPO) untuk membayar orang-orang yang nomornya naik.

- Bahwa adapun permainan judi kupon putih tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan system undi atau diundi setiap hari kecuali hari selasa dan hari jumat, yang mana jenis pemesanannya ada yang pesan nomor dan ada yang pesan shio dan cara pemasangan untuk shio yaitu jika pasang Rp. 1.000,- untuk shio 1 maka jika shio 1 naik maka diperoleh sebesar Rp. 10.000,- sementara cara pemasangan untuk nomor yaitu ada beberapa macam nomor yang dipasang yaitu mulai dari 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, khusus yang nomor menggunakan 2 digit yang biasa dipesan yaitu mulai dari nomor 00 s/d 99, dan sebagai contoh pemesanan yaitu jika angka yang dipesan 99 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- , jika yang di pesan 3 digit yaitu 999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- sementara yang pemesanan 4 digit yaitu 9999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dari hasil penjualan ketika ada nomor yang undiannya naik, namun jika tidak ada nomor yang naik terdakwa mendapatkan uang dari Sahar (DPO) sebesar Rp. 50.000,- perhari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BASRI Bin MA'RANG, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Pasar Sentral Palampang, Kelurahan Mappasaile, Kecamatan pangkajene Kabupaten Pangkep, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkep, terdakwa telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal adanya Informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi kupon putih disekitar pasar sentral palampang maka dilakukanlah patroli oleh petugas dari Kepolisian Polres Pangkep yaitu Hendrik RB Bin Marten Luther beserta temannya, dan dari penyelidikan yang dilakukan, maka terdakwa dicurigai oleh petugas sehingga dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan di dalam Handphone terdakwa berupa pesan singkat dari Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x).
- Bahwa dalam permainan judi kupon putih tersebut ada beberapa macam shio yang dipasang yaitu shio 1 sampai dengan shio 12 dan terdakwa melakukan pemasangan / pembelian setiap hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu, dan Minggu, dan terdakwa menerima pesanan nomor setiap hari lewat via sms/pesan singkat di handphone milik terdakwa dan kemudian sms tersebut diteruskan kepada Sahar (DPO) dan setelah pengundian maka terdakwa menerima uang dari Sahar (DPO) untuk membayar orang-orang yang nomornya naik.
- Bahwa adapun permainan judi kupon putih tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan system undi atau diundi setiap hari kecuali hari selasa dan hari jumat, yang mana jenis pemesanannya ada yang pesan nomor dan ada yang pesan shio dan cara pemasangan untuk shio yaitu jika pasang Rp. 1.000,- untuk shio 1 maka jika shio 1 naik maka diperoleh sebesar Rp. 10.000,- sementara cara pemasangan untuk nomor yaitu ada beberapa macam nomor yang dipasang yaitu mulai dari 2 digit, 3 digit, dan 4 digit, khusus yang nomor menggunakan 2 digit yang biasa dipesan yaitu mulai dari nomor 00 s/d 99, dan sebagai contoh pemesanan yaitu jika angka yang dipesan 99 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 60.000,- , jika yang di pesan 3 digit yaitu 999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- sementara yang pemesanan 4 digit yaitu 9999 dengan uang sebesar Rp. 1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-
- Bahwa untuk kegiatan permainan judi kupon putih tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000,- dari hasil penjualan ketika ada nomor yang undiannya naik, namun jika tidak ada nomor yang naik terdakwa mendapatkan uang dari Sahar (DPO) sebesar Rp. 50.000,- perhari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Barsi Bin Ma'rang pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dipasar Sentral Palampang Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene kab. Pangkep terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres pangkep karena melakukan perjudian kupon putih atau togel;
- Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna putih biru dengan Nomor IMEI: 351212110752041, 1 (satu) buah SIM card Simpati AS dengan Nomor 085242007824 dan Uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang pecahan 50 ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 ribuan yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada barang bukti berupa Handphone cross milik terdakwa terdapat pesan singkat permintaan pemesanan pemasangan nomor kupon putih yakni Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x);
- Bahwa benar terdakwa bermain dan menjadi tempat untuk memasang judi kupon putih sejak bulan Mei 2014 dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- per hari pemasangan walaupun tidak ada nomor yang naik;
- Bahwa benar adapun cara permainan judi kupon putih menggunakan system undian atau diundi setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat yang mana ada dua jenis pemesanannya yaitu nomor dan shio, contoh pemasangan shio, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, misalnya shio 1 dipasang Rp. 1.000,- (seribu) jika naik maka keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan contoh untuk pemasangan nomor yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka misalnya untuk 2 angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99 apabila angka yang dipasang 99 dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik maka keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit misalnya kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 999, maka jika angka 999 naik maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, jika memesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika naik akan memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar terdakwa hanyalah berperan sebagai pengumpul, jika ada yang ingin memasang nomor kupon putih bias mengirim pesan kepada terdakwa dan pesan tersebut akan diteruskan terdakwa kepada SAHAR (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat yang berwenang untuk bermain dan melakukan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

dengan dakwaan **subsidiaritas, Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP,**

Subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1,

Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

a. Keterangan Saksi

1) Saksi MUNIR Bin JAMALUDDIN JAPPU

Saksi MUNIR Bin JAMALUDDIN JAPPU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa dimana saksi adalah pemilik ikan yang di jual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap oleh anggota kepolisian karena melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pasar Sentral Palampang Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa saksi sedang berada di pasar yakni di tempat terdakwa sedang menjual ikan;
- Bahwa saat saksi dan terdakwa sedang duduk duduk sambil terdakwa menjual ikan tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung menangkap dan merangkul terdakwa dan membawa masuk ke dalam tempat jualan bakso tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi berada, kemudian membawa terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa saat terdakwa dtangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan Handphone milik terdakwa yang saat diperiksa dan diperlihatkan kepada saksi dan beberapa orang terdapat rekapan nomor dari sms bebbberapa orang yang akan memasang nomor;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa bermain judi kupon putih atau orang memasang nomor kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang judi kupon putih karena mendengar dari orang-orang dipasar, saat saksi berada di pasar namun saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara bermain judi kupon putih;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, didekat terdakwa terdapat sejumlah uang hasil penjualan ikan, dimana uang hasil penjual ikan akan diserahkan terdakwa kepada saksi setelah dagangan habis, dan penghasilan terdakwa dari menjual ikan tergantung dari seberapa banyak ikan terjual sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan

tidak keberatan

2) Saksi HENDRIK RB BIN MARTHEN LUTHER

Saksi HENDRIK RB BIN MARTHEN LUTHER dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Pasar Sentral Palampang Kelurahan Mappasaile Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep;
- Bahwa sebelum penangkapan, saksi sebelumnya sudah melakukan pengintaian berdasarkan surat perintah dari adanya laporan masyarakat;
- Bahwa saat saksi telah berada dalam pasar dan melihat terdakwa saksi lalu mendekati terdakwa yang sedang berjualan ikan, saat berada di dekat terdakwa saksi langsung merangkul terdakwa dan membawa masuk kedalam warung jualan bakso, saat berada di dalam warung saksi menyuruh terdakwa mengeluarkan handphone dan isi dalam kantongnya dan ditemukan sebuah Handphone yang setelah diperiksa terdapat beberapa pesan singkat berupa permintaan pemasangan nomor yaitu : Lk. Sukri dengan nomor Hp. 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x) dan Sio 2 (25x) dan saudara Jali Hp 085299291798 memesan No 46 (70x), 58 (40x) dan sio 10 (50x) dan saudara Tanabba dengan Hp. 082349105827 memesan nomor 69 (5x), 21 (5x), 62 (5x) serta sio 9 (10x), 2 (5x);
- Bahwa saat menggeledahan terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada terdakwa bagaimana cara terdakwa memainkan permainan judi togel dan hari-hari apakah terdakwa memasang nomor, yaitu terdakwa memasang nomor kupon putih setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu karena hari tersebut adalah hari pemasangan/pembelian dan adapun shio yang dipasang ada beberapa macam shio yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, misalnya shio 1 dipasang Rp. 1.000,- (seribu) jika naik maka keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk nomor yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka

misalnya untuk 2 angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99 apabila angka yang dipasang 99 dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik maka keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), namun jika nomor yang dipasang tidak naik maka uang pembelian tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Cross warna putih dengan Nomor IMEI : 35 12 12 11 07 52 04 1, 1 (satu) buah SIM Card Simpati AS dengan nomor : 085242007824, serta uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) yang kesemuanya diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian kupon putih;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Basri bin Ma'rang Menerangkan di Sidang Pengadilan

Sebagai Berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dipasar Sentral Palampang Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene kab. Pangkep terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres pangkep;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Polisi Polres Pangkep saat sedang menjual ikan di kios jualan terdakwa saat anggota polisi datang, terdakwa kemudian menghentikan kegiatan menjual lalu terdakwa dibawa ke dalam jualan bakso dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan Handphone milik terdakwa yang berisi sms dari beberapa orang yang memesan nomor yakni Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x);

- Bahwa terdakwa bermain dan menjadi tempat untuk memasang judi kupon putih sejak bulan Mei 2014 dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- per hari pemasangan walaupun tidak ada nomor yang naik;
- Bahwa adapun cara permainan judi kupon putih menggunakan system undian atau diundi setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat yang mana ada dua jenis pemesanannya yaitu nomor dan shio, contoh pemasangan shio, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, misalnya shio 1 dipasang Rp. 1.000,- (seribu) jika naik maka keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan contoh untuk pemasangan nomor yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka misalnya untuk 2 angka mulai dari angka 00 sampai dengan 99 apabila angka yang dipasang 99 dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik maka keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit misalnya kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 999, maka jika angka 999 naik maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, jika memesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika naik akan memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selama ini hanya berperan sebagai pengumpul dimana terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menerima pesanan untuk pemasangan nomor dari orang-orang kemudian pesan tersebut diteruskan kepada SAHAR (DPO) dan setelah pemberitahuan pengumuman nomor nomor apa saja yang naik dari SAHAR biasanya terdakwa menggunakan uang miliknya untuk membayar orang naik kemudian uang milik terdakwa akan digantikan oleh SAHAR (DPO);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib

c. Barang Bukti

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna putih biru dengan Nomor IMEI: 351212110752041;

- 2) 1 (satu) buah SIM card Simpati AS dengan Nomor 085242007824;
- 3) Uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang pecahan 50 ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 ribuan;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Adapun tuntutan penuntut umum dalam kasus perjudian kupon putih ini yang dilakukan oleh terdakwa Basri Bin Ma'rang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diketahui bahwa terdakwa dia diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. *Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP*
2. *Subsidiar: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP*

Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BASRI Bin MA'RANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan Sengaja tanpa izin melakukan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 5 (lima) bulan, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Bahwa Barang bukti yang diajukan kedepan persidangan berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna putih biru dengan Nomor IMEI: 351212110752041;
 - b. 1 (satu) buah SIM card Simpati AS dengan Nomor 085242007824; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar

- uang pecahan 50 ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 ribuan; dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

4. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa

Terdakwa terbukti Bersalah Dan memutus:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin MA'RANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin memberikan kesempatan kepada Khalayak umum bermain judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna putih biru dengan Nomor IMEI: 351212110752041;
 - b. 1 (satu) buah SIM card Simpati AS dengan Nomor 085242007824;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang pecahan 50 ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 ribuan;Dirampas untuk Negara;
 - d. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

5. Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene tentang kasus tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa Basri Bin Ma'rang yang diadili di Pengadilan Negeri Pangkajene telah terbukti sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan adanya keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone Merk Cross , 1(satu) buah SIM card dan uang

tunai Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) Melakukan Tindak Pidana Perjudian.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan dakwaan subsidiar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Karena pada Pasal tersebut telah mencocoki semua unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut dimana terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan. dengan demikian pada kasus ini penerapan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah sesuai dan terhadap terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian.

setelah penulis menganalisis dakwaan penuntut umum dalam kasus tersebut di atas maka dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan itu berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan posisi kasus yang telah dibahas sebelumnya maka perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur-unsur 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa

Penuntut Umum maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Basri Bin Ma'rang sebagai manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur "tanpa mendapat izin". Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu saksi-saksi Munir Bin Jamaluddin Jappu dan saksi Hendrik BR Bin Marthen Luther maka yang dimaksud tanpa mendapat izin dalam perkara ini yaitu terdakwa Basri Bin Ma'rang yang dalam persidangan melakukan melakukan perjudian kupon putih jenis togel tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur "tanpa mendapat izin" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Unsur "dengan sengaja" . Bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan tertentu, cukuplah jika ia menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya(batin) dengan tindakannya. Dalam hal ini tidaklah disyaratkan ia bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam pidana oleh Undang-undang, ketertiban masyarakat, apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdakwa Basri Bin Ma'rang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat di Kab. Pangkajene Dan Kepulauan untuk bermain judi dengan terdakwa merekap nomor dan shio dari pembeli. Berdasarkan

fakta diatas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Unsur “ Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”. Bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan mejadikan sebagai mata pencaharian atau turut dalam perusahaan dalam pemeriksaan di persidangan terungkap cara terdakwa melakukan perjudian kupon putih bahwa apabila ada orang yang ingin membeli nomor memesan nomor togel dapat memesan dan meghubungi terdakwa lewat SMS lalu terdakwa mengumpulkan nomor pesanan tersebut dan kemudian sms tersebut diteruskan kepada Sahar (DPO) dan setelah pengundian maka terdakwa menerima uang dari sahar (DPO) untuk membayar orang-orang yang nomornya naik menggunakan sistem undi atau diundi setiap hari kecuali hari selasa dan jumat. Dengan ketentuan yang mana jenis pemesanannya ada yang pesan nomor dan ada yang pesan shio dan cara pemasangan untuk shio yaitu jika pasang Rp. 1.000,- untuk shio 1 maka jika shio 1 naik maka diperoleh sebesar Rp.10.000,- ,sementara cara pemasangan untuk nomor yaitu ada beberapa macam nomor yang dipasang yaitu mulai dari 2 digit, 3digit dan 4digit, khusu yang nomor menggunakan 2 digit yang biasa dipesan yaitu mulai dari nomor 00 s/d 99, dan sebagai contoh pemesanan yaitu jika angka yang dipesan 99 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan

mendapatkan Rp.60.000,- , jika yang dipesan 3 digit yaitu 999 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- sementara pemesanan 4 digit yaitu 9999 dengan uang sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,-. Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.30.000 dari hasil penjualan ketika ada nomor undiannya naik, namun jika tidak ada nomor yang naik terdakwa mendapat uang dari Sahar (DPO) sebesar Rp.50.000,- perhari. hal tersebut didukung oleh keterangan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam analisa hukum di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan subsidaritas yakni Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian dalam Putusan Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan Majelis Hakim, menimbang bahwa apakah terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan oleh jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Adapun dakwaan yang menurut Majelis Hakim lebih mendekati fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yaitu Dakwaan

Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur Barang Siapa;
- 2) Unsur Tanpa ijin
- 3) Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;
- 4) Unsur dengan tidak perduli akan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang selaku terdakwa yang bernama BASRI Bin MA'RANG dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;
- Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya oprang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

Ad.2 Unsur Tanpa ijin

Menimbang, bahwa kata izin dapat didefinisikan adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan perintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan secara khusus dan menurut Utrecht: Izin adalah bila mana perbuatan tidak pada umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara masing-masing hal secara konkrit maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (E. Utrecht, 1963: 152);

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar pukul 15.00 Wita dipasar Sentral Palampang Kel. Mappasaile Kec. Pangkajene kab. Pangkep terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres pangkep yaitu saksi HENDRIK, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Cross warna putih biru dengan Nomor IMEI: 351212110752041, 1 (satu) buah SIM card Simpati AS dengan Nomor 085242007824 dan Uang tunai sebesar Rp. 308.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 6 (enam) lembar uang pecahan 50 ribuan, 4 (empat) lembar uang pecahan 2 ribuan yang merupakan milik terdakwa dimana pada barang bukti berupa Handphone cross milik terdakwa terdapat pesan singkat berupa permintaan pemesanan pemasangan nomor kupon putih yakni Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp

082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x);

- Bahwa sejak bulan Mei 2014 terdakwa menjadi tempat untuk memasang judi kupon putih dan dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000,- s/d Rp. 50.000,- per hari pemasangan, dan hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa uraian unsur unsur dari pasal diatas bersifat alternatif limitatif, yang tidak harus seluruh unsur terpenuhi namun apabila salah satu uraian dari unsur diatas telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi –saksi keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa salah satu barang bukti berupa Handphone Cross milik terdakwa berisi pesan singkat dari beberapa orang yang memesan nomor yakni Sukri dengan nomor Hp 082248506132 dengan memesan nomor 2 (10x), 98 (25x), 25 (5x), dan shio 2 (25x) dan pesan singkat dari Jali dengan nomor Hp 085299291798 dengan memesan nomor 46 (70x), 58 (40x), dan shio 10 (50x) serta pesan dari Tanabba dengan nomor Hp 082349105827 memesan nomor 69 95x), 21 (5x), 62 (5x), serta shio 9 (10x), 2 (5x) dan adapun cara permainan judi kupon putih menggunakan system undian atau diundi setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jumat yang mana ada dua jenis pemesanannya yaitu nomor dan shio, contoh pemasangan shio, yaitu shio 1 sampai dengan shio 12, misalnya shio 1 dipasang Rp. 1.000,- (seribu) jika naik maka keuntungan yang diperoleh sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan contoh untuk pemasangan nomor yaitu 2 angka, 3 angka dan 4 angka misalnya untuk 2 angka mulai dari angka

00 sampai dengan 99 apabila angka yang dipasang 99 dengan uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) jika naik maka keuntungan yang diperoleh adalah sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) lain halnya untuk pemasangan 3 digit misalnya kita memesan Rp. 1.000 untuk angka 999, maka jika angka 999 naik maka akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) begitupun dengan pemasangan nomor 4 digit, jika memesan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk angka 9999, maka jika naik akan memperoleh Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Menimbang, Bahwa terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya menerima pesanan untuk pemasangan nomor dari orang-orang kemudian pesan tersebut diteruskan kepada SAHAR (DPO) dan setelah pemberitahuan pengumuman nomor nomor apa saja yang naik dari SAHAR (DPO) dan dengan menggunakan uang miliknya terdakwa membayar orang-orang yang nomor pemasangannya naik dimana uang milik terdakwa akan digantikan oleh SAHAR (DPO);
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas perbuatan terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terbukti;

Ad.4. Unsur dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa uraian unsur unsur dari pasal diatas bersifat alternatif limitatif, yang tidak harus seluruh unsur terpenuhi namun apabila salah satu uraian dari unsur diatas telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan dianggap sudah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah;

- Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi dengan cara mengumpulkan rekapan nomor kupon putih melalui pesan singkat (sms) di Handphone milik terdakwa yang kemudian pesan singkat tersebut diteruskan kepada SAHAR (DPO) dan setelah pemberitahuan pengumuman nomor nomor apa saja yang naik dari SAHAR (DPO) dan dengan menggunakan uang miliknya terdakwa membayar orang-orang

yang nomor pemasangannya naik kemudian uang milik terdakwa akan digantikan oleh SAHAR (DPO);

- Bahwa terdakwa menjadi pengumpul perjudian kupon putih memperoleh keuntungan perhari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sejak awal menerima pemesanan judi kupon putih melalui pesan singkat di Handphone dan tidak lagi dilakukan melalui rekapan nomor dikertas, dan terdakwa melakukan perjudian kupon putih tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas unsur dengan tidak perduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terbukti;
- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti sehingga dakwaan subsidair tidak perlu di pertimbangkan lagi;
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban masyarakat

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
 3. Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
 - Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Analisis Penulis

Sifat melawan hukum dalam ilmu hukum dikenal dua macam yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materil merupakan sifat melawan hukum yang luas yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis (dasar-dasar hukum pada umumnya). Jadi walaupun Undang-undang tidak menyebutkan maka melawan hukum adalah tetap merupakan unsur dari tiap tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum formil adalah merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum materil terdiri dari sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif dan sifat melawan hukum dalam fungsi negatif. pengertian sifat melawan hukum secara materil dalam arti positif akan merupakan pelanggaran asas legalitas, pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, artinya ajaran sifat melawan hukum dalam

fungsi positif yaitu meskipun suatu perbuatan secara materil merupakan perbuatan melawan hukum apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut apabila tidak ada aturan tertulis dalam perundang-undangan pidana, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Bagi seorang jaksa dalam mempertahankan dakwaannya dan menjaga agar terdakwa tidak sampai lolos dari jerat hukum adalah sesuatu yang bisa disebut dengan hal yang lumrah, adapun cara yang diusahakan dalam mempertahankan dakwaannya yaitu dengan membuat suatu dakwaan dengan jumlah dakwaan lebih dari satu asalkan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam kasus yang penulis bahas ini ada dakwaan primair dan dakwaan subsidair.

Proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat pengambilan keputusan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. pertimbangan hukum Hakim sangat penting dalam penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa yang terbukti sah melakukan tindak pidana.

Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan dakwa, keterangan saksi, barang bukti dan Pasal-Pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Maka terlebih dahulu Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa para terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh penuntut umum.

Pada perkara Nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Perjudian"

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dengan pembuktian unsur dakwaan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk didalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 303

bis ayat (1) ke-1 yang mana dakwaan dan fakta dipersidangan yang terbukti adalah dakwaan pertama. Berkaitan dengan unsur dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, penulis melakukan wawancara langsung Kepada Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene yang memutus perkara ini, mengatakan bahwa terdapat unsur menekankan kepada orang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha perjudian, yang dimaksud disini usaha perjudian, terdakwa sebagai wadah atau memfasilitasi seseorang untuk melakukan perjudian dan terbukti terdakwa melawan hukum atas perbuatannya untuk menguntungkan diri sendiri.

Putusan Hakim dalam perkara ini sudah tepat dimana perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti sah melakukan tindak pidana perjudian, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh Penutut Umum ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya.

Selain itu Putusan Hakim hendaknya cukup memberikan efek jera kepada si Pelaku atau apabila Pelaku tersebut bisa dikatakan tulang punggung keluarga atau pencari nafkah sebuah keluarga, diharapkan putusan tersebut tidak „mematikan“ keluarga Terdakwa. Terhadap perkara No.90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-

pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan Yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim

Jika melihat dari keputusan Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada terdakwa, penulis kira keputusan Hakim ini sudah tepat dan memberikan efek jera kepada si Pelaku, mengingat hal-hal yang meringankan Hakim pada saat penjatuhan putusan terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa sopan selama persidangan.

Pertimbangan hukum oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perjudian ini, penulis rasa mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti sah, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara putusan nomor 90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene sudah sesuai sebagaimana Penuntut Umum mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur tindak pidana perjudian itu sendiri yaitu unsur barang siapa, unsur menawarkan, unsur dalam kegiatan usaha perjudian dan unsur dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan No.90/Pid.B/2014/PN.Pangkajene telah sesuai yakni dengan terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan bagi para terdakwa.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Penulis berharap pemerintah setempat, dan penegak hukum memiliki visi yang sama untuk memberantas kejahatan Perjudian Kupon Putih
2. Sebaiknya ada tindakan dari aparat hukum agar tindak pidana perjudian dalam masyarakat dapat diberantas. Misalnya, dengan seringnya mengadakan patroli atau pengawasan di lingkungan masyarakat. Diharapkan peran serta masyarakat dalam hal ini masyarakat bersedia melaporkan dan membantu mengawasi para pelaku kejahatan perjudian yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka, bukan malah membiarkannya begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustina, Shinta. 2006. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Universitas Andalas Press. Padang.
- B.Simanjuntak. 1981. *pengantar kriminologi dan patologi sosial*. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT RajaGrafito Persada, Jakarta.
- C.S.T. Kancil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- EY.Kanter dan R. Sianturi. 1986. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Jur, Andi Hamzah. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1995. *Teori Murni Tentang Hukum, Dasar- dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*, Judul Asli *General Theory Of Law*. Alih bahasa Soemardi. Rimdi Press. Jakarta.
- M. Marwan, & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas- asas Hukum Pidana. Cetakan II*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- PAF.Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda*

dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sudarsono. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta:Laksbang PRESSIndo.

Wiyanto, Roni. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.

Yan PramadyaPuspa, 1977, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris, Aneka Ilmu, Semarang.

Bacaan Lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1991.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bambang mahriyanto, Media Center, Surabaya.

<http://makassar.tribunnews.com/2016/01/20/intel-polres-sidrap-bekuk-raja-judi-togel-rappang> di akses pada 27januari 2017 pukul 13:46

